

BAB 2

LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Geografi

Geografi merupakan ilmu yang menelaah bumi dalam hubungannya dengan manusia. Arti geografi yang sebenarnya adalah uraian (*grafien*) artinya menguraikan atau melukiskan) tentang bumi (*geos*) dengan segenap isinya yakni manusia, yang kemudian ditambah lagi dengan dunia hewan dan dunia tumbuhan (Daldjoeni, 2017). Geografi merupakan suatu hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang secara fisik maupun yang menyangkut ke dalam makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, kelingkungan dan kewilayahan untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan. Geografi adalah Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut Pandang kelingkungan, kewilayahan, dalam konteks keruangan (Seminar dan lokakarya 1988).

Sebagai salah satu bidang keilmuan, geografi menganalisa fenomena Geosfer (kejadian-kejadian di permukaan bumi) sebab terjadinya, akibat yang ditimbulkannya serta mencari solusi dari permasalahannya. Adapun yang dimaksud dengan fenomena Geosfer tersebut antara lain seperti Litosfer, dimana Geografi mengkaji tentang lapisan batuan yang membentuk kulit bumi, Hidrosfer yaitu lapisan perairan yang ada di bumi, Atmosfer yaitu lapisan udara yang terdapat di bumi atau yang menyelubungi bumi, Biosfer yaitu lapisan makhluk hidup yang ada di bumi baik flora maupun fauna, kemudian lapisan Antroposfer yaitu lapisan manusia.

Kajian geografi mengenai fenomena Geosfer tentu sangat luas meliputi aspek baik fisik maupun non fisik yang ada dipermukaan bumi, untuk mempelajari itu semua, geografi juga mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengkaji semua fenomena Geosfer tersebut baik pada aspek wilayah (*Regional*) dan lingkungan (*Ecological*) dalam konteks keruangan (*Spatial*).

2.1.2 Geografi Pertanian

Secara umum pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, sedangkan pengertian pertanian dalam arti luas yaitu merupakan segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang meliputi pertanian dalam arti sempit. Menurut Sriyanto (2005) Pertanian merupakan aktivitas pengolahan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk pangan dan non-pangan. Awal mula kegiatan pertanian terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan tanaman dan hewan dimana hal tersebut bertujuan guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia tentunya tidak dapat terlepas dari kegiatan pertanian dimana hal tersebut merupakan tumpuan paling utama untuk manusia memenuhi kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu kegiatan pertanian terus berkembang dimulai dari zaman dahulu yang berawal dari berburu dan meramu, kemudian beralih menuju pertanian tradisional hingga yang saat ini kita banyak jumpai yaitu pertanian modern dimana pertanian pada saat ini sudah semakin maju dengan melibatkan banyak teknologi yang mutakhir, hal tersebut tentunya bertujuan untuk lebih memanfaatkan kemajuan dari pada teknologi itu sendiri disisi lain hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian guna mencukupi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Meningkatnya bidang pertanian maupun keilmuan mengenai pertanian tentunya tidak terlepas dari peran bidang keilmuan lainnya seperti keilmuan yang mempelajari tanah, iklim, air, lokasi, keruangan dan lain sebagainya yang merupakan hal yang paling mendasar dalam dunia pertanian, beberapa keilmuan tersebut pun dirangkum dalam keilmuan geografi, sehingga terdapat pula kajian mengenai Geografi Pertanian.

Geografi pertanian berkaitan dengan aktivitas manusia terhadap lingkungan, atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya guna memenuhi kebutuhannya. Kajian geografi pertanian, lebih memusatkan

perhatiannya terhadap hubungan tumbuhan yang dibudidayakan dengan tanah, topografi dan iklim untuk mengkaji persebaran, jenis beserta agihan, juga mengkaji dan menguraikan lebih luas mengenai perbedaan kawasan dalam pertanian. Keadaan geografis suatu daerah akan menentukan jenis penggunaan tanaman dan teknologi pertanian yang digunakan, kondisi geografis juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain seperti iklim, suhu, jenis tanah, kondisi morfologi, curah hujan, angin dan lainnya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut perencanaan dalam pertanian tentu harus diperhitungkan dengan sebaik mungkin karena setiap kombinasi tanah, iklim, air dan komponen lainnya memerlukan penanganan yang berbeda untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja seperti yang diinginkan. Suatu kombinasi dari sejumlah komponen tersebut dapat menciptakan suatu kawasan pertanian yang efektif dan berbeda antara satu kawasan dan yang lainnya dimana hal tersebut tentunya sangat berpotensi untuk terus dilakukan pengembangan.

Pertanian merupakan salah satu hal yang paling pokok untuk memenuhi kebutuhan manusia, setiap tahun jumlah manusia akan terus bertambah, namun jumlah lahan pertanian justru semakin berkurang hal tersebutlah yang akan menjadi suatu tantangan dimasa yang akan datang yaitu bagaimana caranya agar kebutuhan manusia tetap terpenuhi. Pembangunan wilayah juga tentu tak terlepas pula daripada salah satunya dari pertanian sebagai tumpuannya, oleh karena itu penggunaan teknologi pertanian harus terus dilakukan dan terus untuk dilakukan inovasi, disisi lain pengelolaan yang baik pun harus selalu ditingkatkan pengembangan usaha pertanian menjadi salah satu solusi untuk hal tersebut. Pada pembangunan wilayah di beberapa wilayah turut juga melibatkan pertanian sebagai solusi daripada pengembangan wilayah tersebut, dimana peningkatan produksi pertanian menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga daerah tersebut dapat berkembang dari segi sosial dan ekonominya.

2.1.3 Perencanaan dan Pembangunan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah pada

umumnya akan dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sementara perencanaan aktivitas biasanya tertuang dalam rencana pembangunan wilayah baik dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Pembangunan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Perencanaan pembangunan wilayah tidak dapat terlepas dari apa yang telah ada pada wilayah sebelumnya, aktor pembangunan yaitu masyarakat maupun pihak terkait yang ingin melakukan pembangunan pada suatu wilayah tentunya harus mengetahui potensi dari suatu wilayah yang akan dikembangkan agar pembangunan tersebut dapat berjalan secara efektif dan terarah. Pada umumnya perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral maupun pendekatan regional seperti sebagai berikut:

a. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas beberapa sektor, yang selanjutnya dari setiap sektor tersebut akan dianalisis dari setiap potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang akan ditingkatkan dan juga sekaligus menentukan wilayah yang akan dilakukan pengembangan. Analisis sektoral tidak berarti satu sektor dengan sektor yang lain akan dipisahkan satu sama lainnya, melainkan dalam pendekatan ini akan sekaligus dianalisis keterkaitan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya sehingga antara sektor tersebut dapat saling mempengaruhi jika terdapat keterkaitan. Metode ini dikenal dengan analisis masukan-keluaran. Analisis metode masukan-keluaran pernah diuji coba oleh Leknas pada tahun (1978) di Sumatera Utara. Pada metode ini, dibuat suatu anggapan bahwa perkembangan pada sektor penghasil barang akan mendorong sektor lainnya, jadi ada suatu korelasi antara sektor penghasil barang dengan sektor-sektor lainnya. Sektor penghasil barang adalah sektor pertanian, perindustrian, dan pertambangan, dari pertumbuhan beberapa sektor tersebut

ternyata akan mempengaruhi pertumbuhan pada sektor perekonomian sehingga dapat disimpulkan bahwasanya antar sektor tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

b. Pendekatan Regional

Pendekatan regional yaitu pendekatan yang mengedepankan penggunaan ruang saat ini, aktivitas yang akan mengubah mengenai penggunaan ruang saat ini dan juga memperkirakan bentuk penggunaan ruang dimasa yang akan datang. Pendekatan regional dalam arti luas adalah memperhatikan penggunaan ruang untuk produksi atau jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan, memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta merencanakan jaringan-jaringan penghubung sehingga berbagai konsentrasi yang ada dapat terhubung dengan efisien. Analisis pendekatan regional didasarkan pada anggapan bahwa perpindahan orang dan barang dari suatu daerah adalah bebas dimana orang akan berpindah berdasarkan daya tarik dari suatu daerah yang lebih kuat daripada daerah lainnya. Pendekatan regional adalah pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing, hal inilah yang menyebabkan setiap wilayah dapat menjalin hubungan untuk saling mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Analisis regional berusaha meramalkan penduduk berdasarkan daya tarik dari setiap satuan wilayah. Pada dasarnya pergeseran penduduk sekaligus menggambarkan pergeseran faktor produksi karena pergeseran penduduk selalu disertai atau disebabkan oleh modal dan keahlian. Pendekatan regional adalah pendekatan ekonomi dan ruang, pendekatan ekonomi regional dapat memberikan jawaban atas sektor mana yang perlu dikembangkan serta prioritas pengembangannya, akan tetapi belum mampu untuk menjawab pertanyaan seperti dimana lokasi sektor itu dikembangkan, berapa luas lahan yang dikembangkan serta besarnya sarana dan prasarana yang perlu dibangun. Analisis ekonomi regional kemudian dikombinasikan dengan pendekatan tata ruang sehingga harus dibarengi dengan peta-peta untuk mempermudah dan memantapkan analisis.

Perencanaan pembangunan wilayah tidak cukup hanya menggunakan pendekatan sektoral saja atau regional saja, melainkan memadukan keduanya. Pendekatan sektoral saja tidak akan mampu melihat adanya kemungkinan tumpang-tindih penggunaan lahan (kecuali melakukan pendekatan komprehensif seperti *linear programming*) juga tidak mampu melihat perubahan struktur ruang yang mungkin terjadi sebagai akibat dari dilaksanakannya pendekatan sektoral tersebut. Seperti tidak mampu melihat wilayah mana yang kurang terbangun, perubahan dan pergerakan arus manusia, wilayah mana yang akan berkembang dan lain sebagainya. Pendekatan regional juga tidak cukup karena analisisnya akan bersifat makro sehingga tidak akan cukup detail untuk membahas sektor per sektor apalagi komoditi per komoditi, karena pendekatan regional tidak mampu menjelaskan seperti komoditi apa yang akan dikembangkan, berapa luas wilayahnya, apakah masih tersedianya pasar untuk komoditi tersebut dan lain sebagainya. Atas beberapa alasan tersebut idealnya dalam perencanaan pembangunan wilayah tentu harus menggabungkan kedua sektor tersebut agar dapat menjawab semua pertanyaan yang diperlukan dalam pembangunan wilayah tersebut.

Pembangunan wilayah tentunya menjadi suatu hal yang harus terus dilakukan guna mensejahterakan penduduk yang berada di suatu wilayah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat dilakukan dalam upaya pembangunan wilayah seperti dari sektor industri, jasa, pertambangan dan bahkan pertanian. Saat ini banyak wilayah yang sedang diupayakan untuk dilakukan pengembangan salah satunya yaitu dirancangnya suatu kawasan sektoral khusus yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dimana salah satu kawasan sektoral tersebut adalah pengembangan Agropolitan Arjawinangun yang mana akan diupayakan pembangunan wilayah yang berbasis pada sektor pertanian.

2.1.4 Agropolitan

Agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Mc. Douglass dan Friedmann pada tahun 1974 guna pengembangan pedesaan, (dalam A.K Mahi, 2014: 2). Secara harfiah, Agropolitan berasal dari dua kata yaitu

(*agro*=pertanian), dan (*politan/polis*=kota), sehingga secara umum program Agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu kawasan tertentu yang berbasis pada pertanian. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (A.K Mahi, 2014: 2). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan Agropolitan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agribisnis. Pada dasarnya kawasan Agropolitan merupakan kawasan terpilih untuk dikembangkan dengan melalui berbagai pertimbangan atas dasar melihat berbagai potensi yang terdapat pada kawasan tersebut, yang dikembangkan menjadi kawasan perkotaan minimalis berbasis pada sektor pertanian, dimana terdapat pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian pada kawasan tersebut dan wilayah-wilayah sekitarnya dengan harapan dapat mengembangkan perekonomian di kawasan tersebut maupun wilayah yang terdapat di sekitarnya. Selain itu, kawasan Agropolitan dapat dikatakan sebagai embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.

a. Konsep Agropolitan

Konsep Agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Mc. Douglass dan J. Friedmann pada tahun 1974 (dalam A.K Mahi, 2014: 2) sebagai rencana untuk mengembangkan wilayah pedesaan. Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melainkan juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial baik mengenai pendidikan, kesehatan, seni budaya, politik, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Agropolitan merupakan salah satu bentuk pembangunan wilayah yang memadukan

pembangunan pada sektor pertanian di wilayah pedesaan dengan sektor industri yang selama ini banyak digunakan di kota-kota besar. Konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan, dengan demikian masyarakat tidak perlu pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan seperti di kota maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pusat pelayanan akan ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat, dengan kata lain kawasan Agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. Pada kawasan Agropolitan juga harus terdapat sektor industri, jasa, pariwisata, dan sebagainya, yang berbasis pada pertanian dalam arti yang luas, sehingga pengembangan wilayah dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Agropolitan memiliki fungsi sebagai terminal kegiatan pelayanan arus *input* maupun *output* pertanian, peran Agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian yang ada disekitarnya dimana tempat berlangsungnya kegiatan agribisnis yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada sistem Agropolitan terdapat istilah yang dikenal dengan Agropolitan *district* yaitu wilayah pedesaan dengan radius pelayanan hingga 5-10 km, jasa-jasa yang disediakan akan disesuaikan dengan tingkat perekonomian juga sosial budaya masyarakat setempat (A.K Mahi, 2014: 2). Kawasan Agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada.

Kawasan Agropolitan yang sudah berkembang akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis).
- 2) Kegiatan dikawasan tersebut sebagian besar didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.

- 3) Hubungan antara kota dan daerah-daerah *hinterland*/daerah-daerah sekitarnya di kawasan Agropolitan bersifat timbal balik yang harmonis dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*Off farm*). Sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan Agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi/produk pertanian.
- 4) Kehidupan masyarakat di kawasan Agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di kawasan Agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.

Kawasan Agropolitan juga tentunya memiliki kriteria tersendiri untuk dijadikan suatu kawasan Agropolitan, dimana tidak semua wilayah yang memiliki lahan pertanian luas dapat dijadikan kawasan Agropolitan. Menurut (Ali Kabul Mahi, 2014: 3) suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan Agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan meliputi:

- 1) Memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditas pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan), serta berpotensi atau lebih berkembang diversifikasi usaha dari komoditas unggulannya. Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian *on-farm* tetapi juga kegiatan *off farm*-nya; yaitu mulai pengadaan sarana dan prasarana pertanian (seperti benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alat pertanian dan lainnya), kegiatan pengolahan hasil pertanian (seperti membuat produk olahan, produk makanan ringan/keripik, dodol, dan lain-lain) sampai dengan kegiatan pemasaran hasil pertanian (seperti bakulan, warung jual beli hasil pertanian, pasar lelang terminal/sub terminal agribisnis dan lain-lain) dan juga kegiatan penunjangnya (seperti pasar hasil agrowisata).

- 2) Memiliki berbagai prasarana dan sarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, antara lain jalan, pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, seperti:
 - a) Pasar, untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang gudang tempat penyimpanan dan prosesing hasil pertanian sebelum dipasarkan;
 - b) Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal dan kegiatan agribisnis;
 - c) Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA), kelembagaan petani di samping sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan kelembagaan petani/petani maju dengan petani di sekitarnya merupakan inti plasma dalam usaha agribisnis;
 - d) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Pada pengembangan kawasan Agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi balai penyuluhan pembangunan terpadu di mana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pembangunan kawasan Agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti kontak tani/petani maju, tokoh masyarakat dan lain-lain;
 - e) Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis, untuk penerapan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan Agropolitan;
 - f) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian (agribisnis) yang efisien; dan
 - g) Prasarana dan sarana agribisnis yang terdapat dalam kawasan Agropolitan.

- 3) Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
- 4) Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain.
- 5) Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumber daya alam, kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin.

Kawasan Agropolitan tentunya juga memiliki tujuan tersendiri demi terwujudnya hubungan antar kota dan desa serta meminimalisir kesenjangan antar keduanya. Tujuan yang hendak dicapai dalam konsep Agropolitan khususnya dalam pembangunan perdesaan adalah sebagai berikut.

- 1) Mengubah wilayah pedesaan dengan cara memperkenalkan dan memasukkan kegiatan non pertanian (industri, perdagangan) yang telah disesuaikan dengan lingkungan pedesaan tersebut sehingga dapat mengurangi arus migrasi desa-kota.
- 2) Menyeimbangkan pendapatan desa dan kota serta memperkecil perbedaan-perbedaan sosial ekonomi dengan cara memperbanyak kesempatan kerja produktif dari paduan sektor pertanian dan non pertanian.
- 3) Pemanfaatan tenaga kerja secara tepat guna dengan membuka peluang kerja dan berusaha dari perluasan kegiatan usaha non pertanian dan pembangunan infrastruktur pembangunan.
- 4) Merangkai wilayah perdesaan (agropolitan) dalam jaringan regional dengan peningkatan aksesibilitas wilayah.
- 5) Menyalurkan pengetahuan dan kepandaian penduduk setempat pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya.
- 6) Memperbaiki nilai tukar barang-barang antara desa dan kota sehingga tercipta kesesuaian harga yang saling menguntungkan.

b. Struktur Hierarki Tata Ruang Agropolitan

Kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang terbentuk oleh sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dengan adanya hierarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat Agropolitan (*central place*) dan desa-desa di sekitarnya (*Hinterland*). Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) atau *Central place* kawasan Agropolitan berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, pasar, pusat industri pertanian, juga penyedia lapangan pekerjaan non pertanian. Sedangkan kawasan pengembangan (*hinterland*), berfungsi sebagai pusat produksi pertanian, pusat permintaan barang, juga pusat produksi pertanian siap jual. Keterkaitan keruangan antara pusat kegiatan *Central Place* dengan desa-desa *hinterland*-nya dalam pengembangan kawasan Agropolitan dapat tergambar melalui identifikasi pergerakan arus barang, jasa dan informasi antar desa/kampung dalam kawasan Agropolitan.

Kawasan Sentra produksi pangan atau Agropolitan pada umumnya terdiri atas:

- 1) Kawasan lahan pertanian (*hinterland*) berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembesaran, budidaya pengelolaan pertanian. Penentuan *hinterland* berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan, ketergantungan kecamatan/desa pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
- 2) Kawasan pemukiman merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 3) Kawasan pengolahan dan industri merupakan kawasan tempat penyelesaian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar kemudian diperdagangkan. Pada kawasan pengolahan biasanya berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.

- 4) Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum yang terdiri dari pasar kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
- 5) Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

Kemudian jika dilihat secara seksama kawasan-kawasan tersebut akan menghasilkan suatu pola keruangan yang saling keterkaitan antara satu sama lain, dan yang paling utama yaitu antara kawasan DPP dengan *hinterland*-nya yang mana juga akan mewakili keterkaitan antar kawasan di kawasan Agropolitan tersebut. Secara konseptual pola keterkaitan antara desa *hinterland* dan DPP terlihat sebagaimana berikut:

- 1) Desa Pusat Pertumbuhan (DPP/*Central Place*)

Fungsi utama Desa Pusat Pertumbuhan dalam kawasan Agropolitan adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat distribusi barang dan informasi, pusat pemberdayaan dan penyuluhan usaha agribisnis. Pada pengembangan kawasan Agropolitan, penetapan DPP memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya kampung ataupun kesatuan perkampungan ataupun desa, dengan pusat kampung/desa tersebut berfungsi sebagai pusat distribusi barang, jasa, dan informasi.
- b) Memiliki wilayah lahan kering yang cukup datar dan luas dengan penggunaan lahan dominan pertanian.
- c) Memiliki akses yang memadai baik antar desa dalam kawasan maupun pusat pertumbuhan lainnya.
- d) Memiliki kelembagaan dan pimpinan formal yang berjalan dengan baik.

- 2) Desa Pengumpul dan Pengolah Bahan Baku

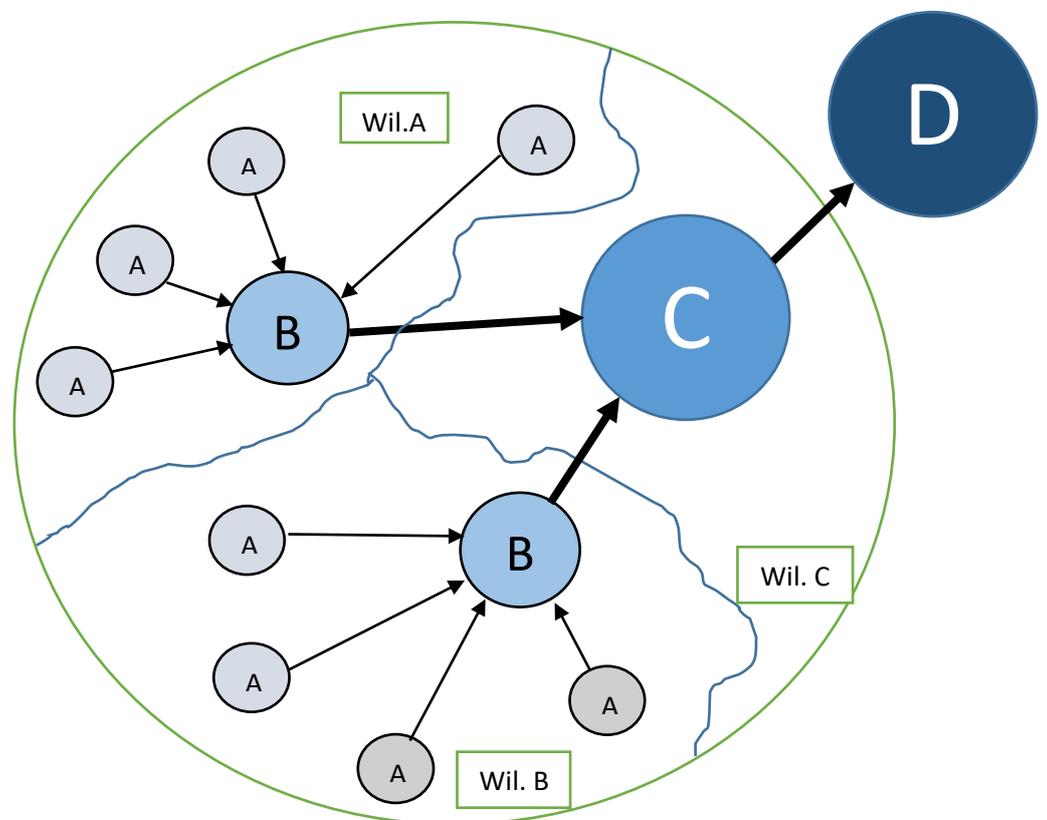
Desa pengumpul dan pengolah bahan baku dalam kawasan Agropolitan merupakan desa-desa/kampung di sekitar Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang memiliki potensi agribisnis komoditas unggulan terbesar untuk dikembangkan dalam rangka mendukung percepatan

perkembangan dan pertumbuhan pusat kawasan. Fungsi desa pengumpul dan pengolah bahan baku yaitu sebagai pusat pengumpulan bahan baku dari desa penghasil bahan baku khususnya yang berada dalam kawasan Agropolitan, kemudian juga berfungsi sebagai pusat pengolahan bahan baku jadi maupun setengah jadi.

3) Desa Penghasil Bahan Baku

Desa penghasil bahan baku yaitu desa/kampung yang berpotensi untuk menghasilkan bahan baku pengolahan hasil pertanian. Fungsi utama desa ini yaitu menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolah bahan baku yang berada di desa pengumpul dan pengolah bahan baku.

Adapun pola keterkaitan ruang antara DPP/*Central Place* dan *hinterland* dapat digambarkan seperti berikut :



Sumber : Pengolahan data penulis 2022

Gambar 2.1 Pola Keterkaitan DPP & Hinterland

Keterangan:

- A : Desa penghasil bahan baku
- B : Desa pengumpul dan pengolah bahan baku
- C : Desa Pusat Pertumbuhan
- D : Kota besar (*outlet*)
-  : Batas antar wilayah
-  : Kawasan Agropolitan

Berkaitan dengan hal diatas dapat dilihat bahwasanya seluruh kawasan Agropolitan memiliki perannya masing-masing dalam upaya pengembangan kawasan, dimana pada daerah A yang merupakan daerah penghasil bahan baku, akan mengirimkan bahan bakunya menuju daerah B yang merupakan daerah pengumpul maupun pengolah bahan baku, setelah diolah, barang jadi maupun setengah jadi tersebut akan dikirimkan menuju daerah C yang merupakan daerah industri, perdagangan dan jasa, dan ketika jumlah barang tersebut mencukupi permintaan untuk kawasan Agropolitan tersebut, maka barang akan dikirimkan ke luar kawasan Agropolitan guna memenuhi permintaan dari luar daerah. Alur tersebut membentuk sebuah struktur dan pola hubungan antar wilayah pada kawasan Agropolitan sehingga arah dan pola pengembangan lebih terstruktur. Adanya hal tersebut juga dapat membentuk struktur dan tata ruang yang khas pada kawasan Agropolitan yang berbeda dengan bentuk pengembangan wilayah lainnya. Kemudian jika ditinjau dari aspek tata ruang maka secara umum struktur hierarki sistem kota Agropolitan dapat digambarkan sebagai berikut (A.K Mahi 2014:7):

- 1) Orde paling tinggi (kota tani utama) yang berfungsi:
 - a) Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar daerah, untuk lingkup besar bahkan ekspor nasional maupun internasional.
 - b) Pusat kegiatan *manufacturing final* industri pertanian, stok pergudangan, dan perdagangan bursa komoditas.
 - c) Pusat berbagai kegiatan tersier agribisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan.

- d) Pusat berbagai pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, kebudayaan dan lainnya termasuk juga *General Agro-industry services*.
- 2) Orde kedua (pusat distrik agropolitan) berfungsi sebagai:
 - a) Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan perdagangan komoditas sejenis.
 - b) Pusat kegiatan agro-industri berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agri-bisnis.
 - c) Pusat pelayanan agro-industri khusus pendidikan, pelatihan, dan pembibitan tanaman unggul.
 - 3) Orde ketiga (pusat satuan kawasan pertanian)
 - a) Pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian.
 - b) Pusat koleksi komoditas pertanian yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri.
 - c) Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas.
 - d) Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman pertanian.
 - e) Adanya koperasi dan informasi pasar barang perdagangan.

c. Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan Agropolitan merupakan pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kawasan Agropolitan A.K Mahi (2014: 24-25). Pengembangan kawasan Agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Pengembangan kawasan Agropolitan di setiap daerah berarti membangun titik-titik tumbuh ekonomi daerah berbasis pertanian, dengan harapan satu titik tumbuh akan dapat mendinamisasi dan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya titik-titik tumbuh yang lain dan seterusnya. Jika proses ini dapat berjalan lancar maka

dengan sendirinya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dengan mudah diwujudkan. Adapun pengembangan Agropolitan yaitu pengembangan pedesaan dengan cara memperkenalkan/ mendekatkan fasilitas kota ke pedesaan yang disesuaikan dengan karakteristik pedesaan. Pengembangan kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterikatan desa dan kota. Hal ini dapat terwujud melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan Agropolitan (Kementerian PU, 2012). Pengembangan kawasan Agropolitan dapat dilakukan dengan baik apabila sebelumnya melakukan analisis sistem hierarki kawasan Agropolitan dan analisis pola keterkaitan antara Desa Pusat Pertumbuhan (DPP, *central place*) dengan daerah *hinterland*-nya. Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam konsep pengembangan kawasan Agropolitan yaitu terdiri dari satu desa pusat pertumbuhan (DPP) yang akan melayani beberapa daerah sentra produksi yang berada disekitarnya (*hinterland*). Kawasan ini sebagai kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat kawasan (*central place*), yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (*hinterland*).

Menurut Rustiadi (2007: 14) menyebutkan pada prinsipnya strategi pengembangan Agropolitan adalah mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah pedesaan melalui pembangunan Agropolitan atau Mikropolitan dan merupakan pembangunan pusat pelayanan pada Kota kecil yang diberikan perlengkapan infrastruktur fasilitas publik perkotaan. Fasilitas publik yang dimaksud antara lain air bersih, listrik, pusat pasar, pusat hiburan, lembaga perbankan dan keuangan, sekolah menengah sampai cabang universitas bersama pusat pendidikan dan latihan serta terdapat bangunan lain, ruang terbuka dan taman, serta saluran pembuangan. Fasilitas-fasilitas tersebut diperlukan guna mendorong dan mendukung dalam mencapai keberhasilan strategi pembangunan pertanian

dan ekonomi pedesaan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kinerja sistem perekonomian nasional. Menurut A.k Mahi (2014:4) Strategi dan arah pengembangan kawasan Agropolitan dapat dilaksanakan dengan cara berikut.

- 1) Strategi pengembangan
 - a) Pengembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana publik berwawasan lingkungan
 - c) Menciptakan iklim kondusif bagi usaha agribisnis
- 2) Arah pengembangan
 - a) Pemberdayaan masyarakat
 - b) Pengoptimalan manfaat sumber daya alam
 - c) Peningkatan komoditas unggulan
 - d) Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian
 - e) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan
 - f) Pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis dan industri
 - g) Pengembangan kelembagaan keuangan

Pada pelaksanaannya perencanaan strategi dan pengembangan kawasan Agropolitan tersebut akan sulit terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan, pembangunan dan pengembangan kawasan Agropolitan diperlukan kerjasama dari berbagai unsur pihak diantaranya:

- 1) Unsur masyarakat petani, masyarakat petani merupakan unsur utama atau unsur penggerak dalam pengembangan kawasan tersebut.
- 2) Unsur birokrat atau pemerintah dimana dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator pembangunan dan berperan sebagai pendamping juga pemberdaya masyarakat.
- 3) Unsur pengusaha, dalam hal ini pengusaha bergerak sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di pedesaan, sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan keuntungan yang wajar tanpa merugikan salah satu pihak manapun.

- 4) Unsur pendukung, meliputi para cendekiawan, pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang peduli terhadap upaya peningkatan ekonomi pada kawasan tersebut melalui pengembangan kawasan Agropolitan, yang diharapkan para unsur pendukung tersebut dapat memberikan dorongan dan dapat bekerjasama melalui keahlian di bidangnya masing-masing.

Dari beberapa uraian diatas kawasan Agropolitan Arjawinangun tentunya juga memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi kawasan Agropolitan terpadu, mengingat Arjawinangun merupakan wilayah yang cukup maju dengan ditopang oleh daerah *hinterland*-nya yang merupakan penghasil sumberdaya pertanian dengan komoditas unggulan berupa padi, disisi lain beberapa fasilitas publik di Arjawinangun juga dapat menjadi kelebihan tersendiri untuk dapat dikembangkan menjadi kawasan Agropolitan.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan artinya dalam penyusunan penelitian ini bukanlah merupakan suatu penelitian yang baru dalam bidang ini dimana peneliti disini menjadikan penelitian dari sumber lain sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitiannya, adapun beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian yang relevan

No	Penulis	Judul	Tahun	Rumusan Masalah
1	Rian Putro Wibowo	Implementasi rencana pengembangan kawasan Agropolitan (Studi perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	2018	1. Bagaimanakah Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat

		Ponorogo Tahun 2012-2032)		Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan?
2	Maya Ulfayani Makmur	Strategi pengembangan kawasan Agropolitan di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru	2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Struktur Ruang Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru? 2. Bagaimana Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru
3	Laelatul farhanah	Pengembangan kawasan Agropolitan di wilayah Rojonoto Kabupaten Wonosobo	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas apa yang menjadi unggulan masing-masing kawasan sentra produksi pada Kawasan Agropolitan di Wilayah Rojonoto Kabupaten Wonosobo? 2. Bagaimana kendala pengembangan Kawasan Agropolitan di Wilayah Rojonoto Kabupaten Wonosobo? 3. Bagaimana strategi pengembangan kawasan Agropolitan di Wilayah Rojonoto Kabupaten Wonosobo berdasarkan urutan prioritas?

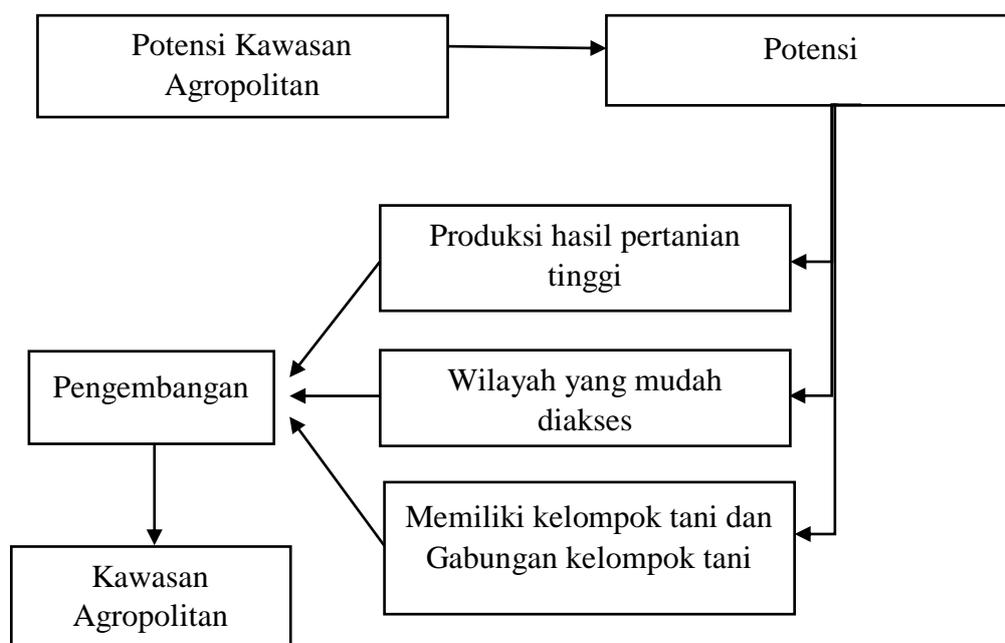
Sumber: Hasil Studi Pustaka 2022

Berdasarkan contoh penelitian yang relevan pada tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa penelitian memiliki kesamaan antara penelitian yang sebelumnya maupun penelitian yang sedang dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat dari tema penelitian yaitu tentang kawasan Agropolitan, hanya saja berbeda waktu dan tempat penelitian yang dilakukan, dimana penelitian yang sekarang sedang dilakukan yaitu bertempat di kawasan Agropolitan Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teoritis dan juga didukung dengan adanya penelitian yang relevan, maka ditentukan kerangka konseptual guna mendukung penyusunan hipotesis yang akan disusun untuk mengetahui jawaban sementara dari penelitian yang berjudul “Pengembangan potensi kawasan Agropolitan Arjawinangun di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”. Adapun kerangka konseptual yang disusun, sebagai berikut.

1. Kerangka Konseptual 1

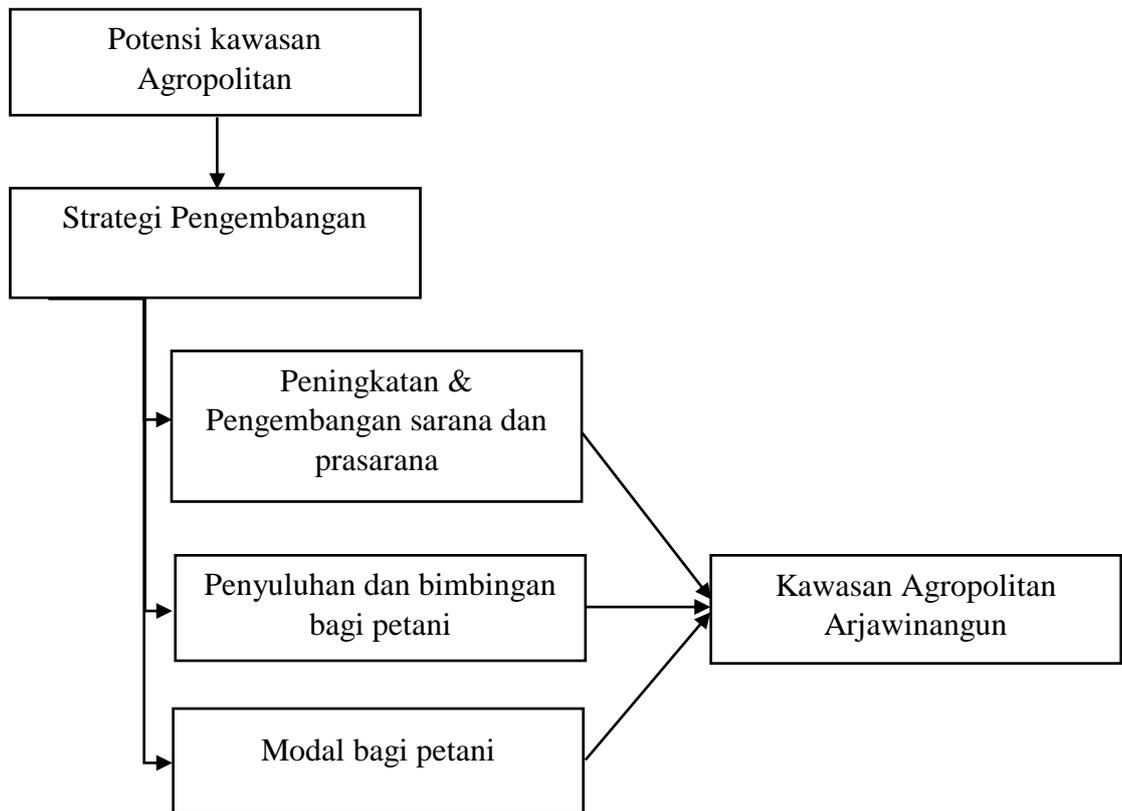


Sumber: Data primer penulis 2022

Gambar 2.2 Kerangka konseptual 1

Kerangka konseptual ini berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu “Potensi apa sajakah yang terdapat di kawasan Agropolitan Arjawinangun di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon” dimana kawasan ini patut untuk dikembangkan menjadi kawasan Agropolitan karena pada dasarnya wilayah Arjawinangun dan sekitarnya memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung wilayah ini menjadi kawasan Agropolitan Arjawinangun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2038, dimana potensinya antara lain wilayah ini memiliki hasil pertanian yang cukup melimpah bahkan menduduki deretan wilayah paling tinggi penghasil padi di Kabupaten Cirebon, disisi lain kemudahan akses untuk menuju ke wilayah ini pun merupakan salah satu potensi untuk mendukung pengembangan wilayah ini menjadi kawasan Agropolitan. Kemudian ketiga hal tersebut juga didukung dengan adanya kelompok tani maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di kawasan Agropolitan tersebut sehingga memudahkan para petani dalam menerima penyuluhan maupun bertukar wawasan baik antara petani dengan penyuluh maupun antara sesama petani. Jika potensi-potensi tersebut terus dikembangkan maka wilayah tersebut dapat semakin berkembang dan kawasan Agropolitan dapat terwujud.

2. Kerangka Konseptual 2



Sumber: Data primer penulis 2023

Gambar 2.3 Kerangka konseptual 2

Kerangka Konseptual 2 ini berdasarkan rumusan masalah yang kedua yaitu “Bagaimanakah strategi pengembangan potensi yang terdapat di kawasan Agropolitan Arjawinangun di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon” dimana pada wilayah ini yang merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan Agropolitan, namun tentunya perlu adanya strategi pengembangan untuk mewujudkan hal tersebut, dalam hal ini terdapat dua strategi antara lain yaitu, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dimana hal ini merupakan hal yang paling mendasar dalam sebuah pembangunan tak terkecuali untuk kawasan Agropolitan dimana pada wilayah ini memang untuk sarana dan prasarana maupun fasilitas umum lainnya masih kurang dan perlu ditingkatkan, kemudian strategi lainnya yaitu peningkatan industri pengolahan hasil pertanian yang harus ditingkatkan pula, dikarenakan kebanyakan rumah industri

pengolahan masih banyak yang menggunakan teknologi sederhana sehingga perlu adanya peningkatan kembali guna menghasilkan hasil industri yang lebih baik. Pemberian modal juga dapat menjadi solusi bagi para petani untuk lebih mengembangkan hasil pertaniannya, karena masih cukup banyak petani yang terkendala akan permodalan untuk usaha pertaniannya. Beberapa hal tersebut tentu merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kawasan Agropolitan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

2.4 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini penulis berhipotesis mengenai pengembangan potensi kawasan Agropolitan Arjawinangun di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon memiliki beberapa hipotesis diantaranya sebagai berikut.

1. Potensi yang terdapat di kawasan Agropolitan Arjawinangun Kabupaten Cirebon diantaranya yaitu, merupakan salah satu wilayah paling tinggi di Kabupaten Cirebon dalam menyumbang hasil pertanian khususnya padi, memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau, dan sudah adanya perkumpulan atau kelompok tani, maupun Gapoktan atau Gabungan kelompok tani.
2. Strategi pengembangan potensi kawasan Agropolitan Arjawinangun di Kabupaten Cirebon, antara lain seperti, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan Agropolitan, peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, dan perlu adanya pemberian modal bagi petani.